

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amien Rais, 1996, *Cakrawala Islam Antara Cinta Dan Fakta*, Mizan, Bandung.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2020, *Pedoman Penanggulangan Radikalisasi di Kalangan Aparatur Sipil Negara*, BNPT, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- H.A.S. Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kementrian Pertahanan, 2008, *Buku Pertahanan Indonesia*, Kementrian Pertahanan RI, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Majdad El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad AS Hikam, 2016, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Hukum Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ni'matul Huda, R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Kajian Teori dan Praktik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus Mandiri Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- Prof. Dr. Supardi Mursalin, 2024, M.Ag, *Pencegahan dan Penanganan Faham Radikal Di Kalangan Mahasiswa*, CV Muhammad Fahmi Al Azizy, Yogyakarta.
- Saut Usman Nasution, 2021, *Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme dan Radikalisasi*, BNPT, Jakarta.
- Serlika Aprita, 2020, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, 2007, *"Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren"*, Tadris.

Syahril, dkk. 2020, *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*, CV. Zigie Utama, Bengkulu.

Tim Penyusun, 2020, *Panduan Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum 2020*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Titin Astini, Aah Johariyah, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung.

Zuly Oodir, 2014, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. Artikel Jurnal**

Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2012.

Andi Akhirah Khairunnisa, Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.

Arie Ramadhani, Hubungan Antara Pemahaman Tentang Ham Dengan Sikap Toleransi Pada Siswa Kelas Viii Semester Genap Smp Negeri 4 Negara Tahun Pelajaran 2016'2017, *Jurnal Santhet*, Vol. 1 No. 2, 2017.

Bashori, “Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol. 2, No. 2, Juni 2021.

Farah Alifa Rahmawaty dan Aziza Aziz Rahmaningsih, “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Firna Novi Anggoro, “Analisis Kebijakan Pencegahan Radikalisme Aparatur Sipil Negara di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 1, Nomor 1, November 2022.

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Suharno, “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan hubungannya dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana*, Vol. 2 No. 1, April 2023.

Firzhal Arzhi Jiwantara, “Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *jatiswarra*, Vol. 34, No. 3, November 2019.

Hendro Wicaksono, Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

John. E. Maliombo dkk, “Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Terkait Organisasi Radikal Di Indonesia Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara”, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Kahrudin, "Hubungan Indonesia dengan Prinsip Non Refoulment dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol.20, No.2, Juni 2012.

Lestari. D, “Indivisibilitas Hak Asasi Manusia: Implikasi dalam Penerapan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Volume 6, Nomor 3, 2018.

Muhammad Iqbal Yunazwardi dan Aulia Nabila, “Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”, *Indonesian Perspective*, Vol.6, No.1, Januari-Juni 2021.

Murthada, Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.4, Desember 2022.

Myaskur, “Penerapan AAUPB Dalam Regulasi Penanggulangan Terorisme”, *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 07 No. 02, September 2022.

Noorhadi Akbar, “Strategi Pencegahan Radikalisme”, *Jurnal Duta Damai*, 2023.

Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Oki Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto, Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal HAM* Vol 12 No. 1 2021.

Rahman. A, “Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Negara dan Hak Asasi Manusia*, Volume 7, Nomor 1, 2021.

Rufaidah dan Nanik Prasetyoningsih, “Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua”, *Media of Law and Sharia*, Volume 4, Nomor 2, 2023.

Setiawan. B, “Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal HAM Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2017.

Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Jurnal Hukum: Legal Standing*, Volume 2, Nomor 2, September 2018.

Widodo. S, “Manusia sebagai Inti Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Humaniora dan Hak Asasi Manusia*, Volume 11, Nomor 2, 2019.

Wiwik Dwijayanti dkk, “Strategi Kontra Radikalisasi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Yang Dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 3, 2023.

Yusuf. M, “Kesetaraan dan Non-Diskriminasi dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 4, 2016.

### **C. Hasil Penelitian**

Lydia De Vega Samosir, 2019, Pelaksanaan Peraturan Bersama Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rofifa Salshabila M. Andi Lolo, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2021.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam.

#### **E. Internet**

Ahmad Pahlevi, “SKB 11 Menteri Mencegah ASN Terpapar Radikalisme”

<https://www.suaradewata.com/berita/201912050001/skb-11-menteri-mencegah-asn-terpapar-radikalisme>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

BKN RI, “Hindari “Abuse of Power” dan Inefisiensi, BKN Hadirkan Standar Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Berbasis TI”, <https://www.bkn.go.id/hindari-abuse-of-power-dan-inefisiensi-bkn-hadirkan-standar-pengawasan-dan-pengendalian-nspk-manajemen-asn-berbasis-ti>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

BNPT, “Kepala BNPT Sharing Strategi Pencegahan Radikalisme di Lingkungan ASN dalam Peluncuran Aplikasi ‘ASN No Radikal’ KEMENPAN-RB”, <https://bnpt.go.id/kepala-bnpt-sharing-strategi-pencegahan-radikalisme-di-lingkungan-asn-dalam-peluncuran-aplikasi-asn-no-radikal-kemenpan-rb>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

BNPT, “BNPT dan BKN Bersinergi Cegah PNS Terpapar Radikalisme dan Terorisme”, <https://www.bnpt.go.id/bnpt-dan-bkn-bersinergi-cegah->

[pns-terpapar-radikalisme-dan-terorisme](#), diakses pada tanggal 9 Februari 2025.

Desca Lidya Natalia, “Moeldoko ungkap tujuan penerbitan SKB Radikalisme dan PP Terorisme”, <https://www.antaranews.com/berita/1181076/moeldoko-ungkap-tujuan-penerbitan-skb-radikalisme-dan-pp-terorisme>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

Humas MENPANRB, “Core Values' ASN Diharapkan Jadi Jurus Jitu Tangkal Radikalisme”, <https://menpan.go.id/site/erita-terkini/core-values-asn-diharapkan-jadi-jurus-jitu-tangkal-radikalisme>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Humas MENPANRB, “Komitmen Menteri Tjahjo Tindak Tegas ASN Terlibat Radikalisme”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-berkomitmen-tindak-tegas-asn-terlibat-radikalisme>, diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

Humas MENPANRB, “Tangani Radikalisme ASN, Pemerintah Bentuk Taskforce dan Portal Aduan ASN”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tangani-radikalisme-asn-pemerintah-bentuk-taskforce-dan-portal-aduan-asn>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

Humas MENPANRB, “Wujudkan Birokrasi Bebas Radikalisme, Menteri Tjahjo Luncurkan Aplikasi ASN No Radikal”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/wujudkan-birokrasi>

[bebas-radikalisme-menteri-tjahjo-luncurkan-aplikasi-asn-no-radikal](#),

diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Humas SetKab RI, “Pemerintah Terbitkan Aturan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN”, <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-aturan-pengawasan-dan-pengendalian-nspk-manajemen-asn/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Satgas Penanganan Radikalisme ASN Segera Dibentuk”, <https://kemenag.go.id/nasional/satgas-penanganan-radikalisme-asn-segera-dibentuk-12oms5>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, “HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah”, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Latuharhary, “Komnas HAM RI Edukasi HAM Bagi ASN dan Perwakilan Masyarakat Kota Semarang”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/18/1865/komnas-ham-ri-edukasi-ham-bagi-asn-dan-perwakilan-masyarakat-kota-semarang.html>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

Mizan Abidi, “Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Asas Praduga tak Bersalah” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl->

[metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-](http://metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html)

[berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html](http://metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html), diakses pada tanggal

20 Februari 2025.

Nafiatul Munawaroh, “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan

Penjelasannya”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/)

[umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/)

[1t62d8f9bedcda1/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/), diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H, M.H, *Radikalisme ASN*, terdapat pada

<https://law.uui.ac.id/blog/2019/12/14/radikalisme-asn/>, diakses pada

tanggal 3 Februari 2025.

Portal Informasi Indonesia, “Istilah Radikal Harus Diganti?”,

[https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-](https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti)

[diganti](https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti), diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Rahmanto, “Radikalisme di Indonesia”,

<https://psychology.binus.ac.id/2022/03/11/radikalisme-di-indonesia/>,

Diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Rasyidin Nahdi, Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konteks

Kesejahteraan Pegawai Kemenag Provinsi Kalimantan Timur,

<https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254>, diakses pada tanggal 5

Maret 2025.

Suherman Toha, “Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian

Konflik Antar Dan Intern Agama”,

<https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-6.pdf>, diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

Syaiful Hakim, “Pro-kontra SKB Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara”, <https://www.antaranews.com/berita/1188072/pro-kontra-skb-penanganan-radikalisme-aparatur-sipil-negara>, diakses pada tanggal 9 Februari 2025.

Teuku Ahmad Barqah, “ASN dan Pengaruh Radikalisme”, <https://aceh.tribunnews.com/2024/11/29/asn-dan-pengaruh-radikalisme>, diakses pada tanggal 9 Februari 2025.

Tim Hukum Online, “Beragam Kritik atas SKB Penanganan Radikalisme ASN” <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-kritik-atas-skb-penanganan-radikalisme-asn-lt5ddcf7d94281a/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Yuliandri, “Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2024.